

## PROGRAM PENDAMPINGAN MENDAPATKAN DANA KUR SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PANGKALPINANG

Renati<sup>1</sup>, Khairiyansyah<sup>1</sup>, Endang Bidayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi, Universitas Bangka Belitung

### ABSTRAK

Program kegiatan ini merupakan skema pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan dana KUR Syariah dan Pemberdayaan UMKM di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan sosialisasi diikuti 30 pelaku UMKM Kota Pangkalpinang. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan mengajukan dana, serta mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya sehingga mampu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan ekonomi secara umum di Kota Pangkalpinang.

**Kata Kunci:** *Pendampingan, KUR Syariah, UMKM*

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Analisis Situasi

Perlambatan ekonomi dunia di Tahun 2019, sudah diprediksi akan tetap berlangsung di Tahun 2020, oleh karena itu semua pihak saat ini sedang mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Konsumsi masih menjadi sumber pendorong utama ekonomi, hal dikarenakan investasi dan net ekspor melambat akibat belum stabilnya kondisi ekonomi Global. Sehingga untuk meningkatkan PDB, lebih efektif bila meningkatkan sektor konsumsi yaitu dengan memperkuat UMKM.

Kontribusi Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi yang tercatat sebanyak 64,19 juta unit atau 99,99% dari total unit usaha. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,22% dari total angkatan kerja yang bekerja dan menyumbang 58,18% dari total investasi yang ada. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 60,34% dari total PDB. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi ekspor totalnya mencapai 14,7%. (Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perindustrian, 2019). Pertumbuhan UMKM berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Apabila terdapat 2,5% UMKM naik kelas, akan terdapat kenaikan PDB nominal sebesar Rp. 468 triliun sehingga PDB riil tahun 2018 seharusnya tumbuh 5,88%. Apabila terdapat 5% UMKM naik kelas, akan terdapat kenaikan PDB nominal sebesar Rp. 936 triliun

sehingga PDB riil tahun 2018 seharusnya tumbuh 6,59%. Dan apabila terdapat 10% UMKM naik kelas, akan terdapat kenaikan PDB nominal sebesar Rp. 1.872 triliun sehingga PDB riil tahun 2018 seharusnya tumbuh 8%.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM Babel akan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, selama beberapa persoalan umum yang lazim terjadi di UMKM tidak mampu diselesaikan, ada 5 (lima) aspek besar yang menjadi tantangan yaitu (1) Terkait Sumberdaya manusia (SDM) dan Manajemen (2) Finansial, (3) Inovasi dan Teknologi (4) Pasar dan Bahan Baku dan (5) Institusi. Pada aspek pertama SDM dan Manajemen teridentifikasi beberapa masalah seperti pola pikir masih dominan *supply it creates own demand* bukan *market driven*, pola pendampingan yang belum mengarah kepada kemandirian, budaya kerja kurang disiplin dan inisiatif rendah, kualitas SDM dan produktivitas yang harus ditingkatkan. Aspek kedua Finansial teridentifikasi aspek sumber pembiayaan, penyusunan laporan keuangan, pajak, dan pengelolaan keuangan usaha masih campur aduk dengan pengelolaan keuangan pribadi. Aspek ketiga, terkait inovasi dan teknologi yang masih rendah seperti inovasi produk, adopsi teknologi baru, dan kapasitas produksi. Pada Aspek keempat Pasar dan Bahan Baku, teridentifikasi seperti akses pasar digital vs konvensional, kemitraan (*off-taker*), akses ekspor dan ketersediaan bahan baku. Terakhir terkait aspek kelima yaitu institusi beberapa persoalan terkait hal tersebut adalah perizinan usaha (IUMK, SKU, IUI, OSS), Standar Produk (P-IRT, BPOM, SNI, K3), dan kontrak bisnis.

Data UMKM selama tiga tahun sejak tahun 2017 menunjukkan angka yang semakin meningkat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2017 sebanyak 150.870 unit usaha kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 150.948 unit usaha dan 2019 meningkat signifikan menjadi 161.186 unit usaha. Sayangnya skala usaha masih didominasi oleh usaha mikro yang mencapai 124.601 (77,30%), usaha kecil 35.724 (22,16%) dan usaha menengah 861 (0,53%). Ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM dilihat dari aset maupun omset usaha masih kecil. Jika dilihat dari lokasi usaha, maka Kabupaten Bangka memiliki UMKM yang paling besar yaitu 54.673 (33,92%) dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Disusul oleh Pangkalpinang 27.703 (17,19%), Bangka Barat 23.270 (14,44%), Bangka Tengah 21.837 (13,55%), Belitung 18.274 (11,34%), Belitung Timur 10.985 (6,82%) dan Bangka Selatan 4.444 (2,76%). (Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Babel 2019). Sehingga Pangkalpinang memiliki potensi UMKM yang cukup tinggi untuk dikembangkan.

## 1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan skalanya, usaha dalam perekonomian dapat diklasifikasikan Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Hasil SE2016-L menunjukkan bahwa lebih dari 97% usaha yang terdapat di Kota Pangkalpinang adalah usaha dengan skala Mikro dan Kecil (UMK). Usaha Menengah hanya berisik pada 2,88%, sementara usaha Besar bahkan tidak mencapai 0,18%.

Tidak berbeda dengan komposisi usaha yang terdapat di Kota Pangkalpinang, sebagian tercatat terserap dalam usaha dengan skala Mikro dan Kecil (UMK). Tenaga kerja yang tercatat bekerja pada UMK

mencapai 71,7%, sementara tenaga kerja pada Usaha Menengah sebesar

21,95% dan Usaha Besar mencapai 6,34%.



Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2016

Gambar 1. Persentase Usaha dan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa dominasi UMKM ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang memang ditopang oleh UMKM. Secara umum UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian suatu daerah. Adapun penghambat yang mempengaruhi perkembangan UMKM antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan.
- b. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas.

UMKM menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM bertujuan meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional guna menumbuhkan iklim usaha. Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam

membentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Lembaga perbankan berperan untuk memenuhi kebutuhan modal atau dana untuk menunjang kegiatan usaha. Terkait dengan Usaha kecil mempunyai salah satu kelemahan kurang tertibnya dalam melakukan pencatatan dan lemah dalam manajemen. Kelemahan dapat membawa dampak terhadap penggunaan dana perusahaan tidak terkendali. Untuk menghindari pemborosan penggunaan dapat memanfaatkan untuk mengontrol penggunaan dana yaitu dengan menyimpan uang ke bank. Bank juga bisa menjalin kerjasama dengan intitusi lain misalkan dengan lembaga pendidikan atau lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan terhadap UMKM. Berikut Gambar yang menunjukkan histori KUR Syariah sejak tahun 2017-2020.



Sumber : BRI Syariah Pusat (2020)

Gambar. 2. Journey Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Tahun 2017-2020

## 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang

melalui kegiatan Bimtek. Adapun luaran dan target capaian yang ingin diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	Submitted
2	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	sudah terbit
3	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi	Ada
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk	Ada
5	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat	Penerapan
6	Peningkatan ketentraman /kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)	tidak ada
7	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang	tidak ada
8	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi)	tidak ada
9	Salah satu Bab untuk Buku Ajar	Draf

### 3. METODE PELAKSANAAN

Program sosialisasi dan bimbingan teknis ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang dan BRI Syariah Cabang Pangkalpinang. Program ini akan melibatkan dosen Universitas Bangka Belitung, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang, Kepala Cabang dan staf BRI Syariah Kota Pangkalpinang beberapa mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Bangka Belitung sebagai pendamping (*buddy*).

Tim akan berkunjung ke Sekretariat HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang untuk melakukan diskusi terkait permasalahan kenapa belum mendapatkan dana KUR Syariah dan apa saja persoalan didalam manajemen usaha. Lalu setelah melakukan diskusi, tim akan menawarkan program sosialisasi dan pendampingan sehubungan dengan persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut. Tim pengabdian masyarakat juga akan menjelaskan beberapa target luaran dari kegiatan ini baik untuk pendampingan maupun pemberdayaan usaha seperti strategi pemasaran produk.

Setelah melakukan diskusi mengenai permasalahan kelompok sasaran dan target yang hendak dicapai, maka Tim akan melakukan penyesuaian pembobotan materi dengan narasumber dan memberikan beberapa rincian khusus agar kegiatan sosialisasi dan pendampingan bisa memberikan manfaat yang optimal. Program pemberdayaan akan melakukan pelatihan Strategi Pemasaran Digital untuk meningkatkan omset penjualan.

Target pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 6 bulan terhitung dari tanggal 20 maret 2020 hingga tanggal 31 september 2020. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari kegiatan Survei yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu ke kantor BRI Syariah 1 kali dan ke sekretariat HIPMIKINDO sebanyak 2 kali. Setelah survey dilaksanakan maka kegiatan sosialisasi akan dilakukan di kantor BRI Syariah Kota Pangkalpinang.

### 4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan berawal dari sebuah Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh ISEI Cabang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021. Dimana dikemukakan oleh BRI Syariah Pusat bahwa data menunjukkan serapan KUR Syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terendah se-Indonesia. Padahal jumlah UMKM di Bangka Belitung ada sekitar 161.000 unit yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota yang ada. Padahal seperti mahfum diketahui, salah satu yang menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM adalah permodalan. Sehingga perlu difasilitasi antara UMKM (HIPMIKINDO-Kota Pangkalpinang) dengan Bank Syariah dalam hal ini BRI Syariah-Pangkalpinang.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi Ketua HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang yaitu Ibu Agusnari Yunus yang memiliki anggota sekitar 100 orang UMKM, dalam hal ini yang aktif keanggotaannya adalah 60 UMKM. Sedangkan dalam kegiatan ini yang diambil adalah 30 UMKM. Setelah HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan dan

menandatangani diatas materai, kemudian Tim Pengabdian menemui Kepala BRI Syariah Kota Pangkalpinang yaitu Bapak Firman Hidayat dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Pengabdian. BRI Syariah Kota Pangkalpinang merespon dengan baik kegiatan ini dan menyatakan kesediannya untuk menjadi narasumber dan mensupport kegiatan ini.



Dalam mensukseskan kegiatan ini juga dilakukan kunjungan dari Mitra ke Universitas Bangka Belitung.

## 5. HASIL YANG DICAPAI

Program sosialisasi dan bimbingan teknis diawali dengan kegiatan diskusi dan sosialisasi kepada mitra, yakni HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang dan BRI Syariah Kota Pangkalpinang (Gambar 3a dan 3b).



Gambar 3. Diskusi dan sosialisasi dengan Ketua HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang (a), dan Kepala Cabang BRI Syariah Kota Pangkalpinang (b). Sumber: Dokumentasi pribadi (2020)

Kegiatan selanjutnya sebelum Bimtek adalah koordinasi kegiatan dengan kedua pihak mitra kegiatan yang bertujuan untuk membahas materi

yang akan disampaikan dan undangan untuk 30 peserta Bimtek yang merupakan pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang (Gambar 4).



Gambar 4. Rapat koordinasi dengan HIPMIKINDO Kota Pangkalpinang dan BRI Syariah Cabang Kota Pangkalpinang. (Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)



Permasalahan mitra UMKM yang selama ini tidak mengakses permodalan ke BRI Syariah, berdasarkan hasil diskusi dengan pelaku UMKM diperoleh informasi jika pelaku UMKM pada umumnya sudah memiliki kredit usaha di bank konvensional, seperti BRI. Hal tersebut disebabkan minimnya informasi terkait sistem pinjaman modal di BRI Syariah.

Pemaparan yang disampaikan Kepala Cabang BRI Syariah Kota Pangkalpinang, diketahui bahwa bagi

hasil yang ditawarkan BRI Syariah cukup menguntungkan nasabah. Terlebih sistem pinjaman dana dengan akad yang Islami, diharapkan pelaku UMKM akan beralih ke BRI Syariah.

Bimtek yang diikuti lebih dari 30 pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang (Gambar 5), juga diisi dengan materi tentang QRIS. Diharapkan dengan aplikasi pembayaran digital QRIS ini pelaku UMKM semakin meningkat penjualan produknya.



(a)



(b)

Gambar 5. Pelaksanaan BIMTEK yang melibatkan BRI Syariah Kota Pangkalpinang dan 30 peserta pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang (a), dan penyerahan sertifikat Narsum (b). Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan mengajukan dana dari mitra UMKM, serta mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Sehingga UMKM mampu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan ekonomi secara umum di Kota Pangkalpinang.

## 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan selanjutnya setelah kegiatan Bimtek adalah memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya bagi UMKM

yang ingin mengajukan pinjaman modal ke BRI Syariah. Selain itu, tim juga memberikan konsultasi dan pendampingan terkait aplikasi QRIS.

## 7. KESIMPULAN DAN SARAN

### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya animo masyarakat untuk hadir pada kegiatan BIMTEK, dan antusiasme peserta yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI

Syariah dengan sistem yang lebih islami.

## 7.2 Saran

Program pinjaman modal dari BRI Syariah agar lebih dikenal luas masyarakat, maka sosialisasi perlu dimasifkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain mengadakan kegiatan promosi yang melibatkan UMKM secara langsung, memberi kemudahan kredit dengan persyaratan yang mudah dan waktu pencairan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2018. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. 2018. Kota Pangkalpinang Dalam Angka. Pangkalpinang. BPS Kota Pangkalpinang.